

Abstrak

Masalah kemiskinan merupakan tantangan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua tipe: kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan kemiskinan kultural yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Salah satu manifestasi kemiskinan adalah keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng), yang disebabkan oleh faktor internal seperti kemiskinan dan kurangnya keterampilan serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran pemerintah dalam menangani masalah Gepeng di Desa Lojejer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai referensi bagi akademisi serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kemiskinan, Gelandangan dan Pengemis, Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial.

Abstarct

Poverty remains a persistent challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty is classified into two types: structural poverty, caused by government policies, and cultural poverty, stemming from societal habits. One manifestation of poverty is the existence of beggars and homeless individuals (Gepeng), which arises from both internal factors such as poverty and lack of skills, and external factors like unfavorable environmental conditions. This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 40 of 2014 concerning the Guidelines for Handling Beggars and Homeless People in Lojejer Village, Jember Regency. The aim of this research is to examine the role of the government in addressing the issue of Gepeng in Lojejer Village. The research employs a legal and conceptual approach with a normative juridical type of research. The findings of this study are expected to provide theoretical contributions as references for academics and practical benefits for policymakers in addressing social issues related to beggars and homeless people in Jember Regency. It is hoped that this research will enhance social welfare in line with the mandate of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare and Jember Regent Regulation No. 40 of 2014.

Kata Kunci: Poverty, Beggars and Homeless People, Social Policy, Social Welfare.